

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi. Konsep desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Bratakusumah, 2001). Desentralisasi adalah pendelegasian sebagian tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat (Elcaputera, 2021).

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintah di tingkat daerah. Pemerintah daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dipimpin oleh kepala daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat daerah (Sunarso, 2023). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya mencakup pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memuat opini audit atas LKPD. Opini tersebut adalah pernyataan independen yang memberikan pernyataan atas kewajaran penyajian informasi dalam LKPD.

Permasalahan yang ditemui di lapangan, masih terdapat pemerintah daerah yang belum dapat menyajikan laporan keuangannya secara wajar. Hal tersebut digambarkan masih terdapatnya pemerintah daerah yang belum memperoleh WTP atau opini Wajar Tanpa Pengecualian. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 (satu) tahun 2022 yang diterbitkan BPK, sebanyak 541 pemerintah daerah yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh BPK masih terdapat 41 pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2021. Selain itu, terdapat 24 pemerintah daerah dari yang belum pernah

memperoleh opini WTP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pemberian opini oleh BPK dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem pengendalian intern (SPI) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Meiliza (2015) dalam penelitiannya, disebutkan bahwa penyebab kegagalan perolehan opini WTP adalah kelemahan sistem pengendalian internal dan kelemahan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengintensifikasian peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) daerah yang efektif. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan pengendalian internal yang efektif meliputi peran APIP dan penerapan SPIP.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maulida (2017) menyebutkan bahwa maturitas SPIP dan kapabilitas APIP berpengaruh signifikan positif terhadap opini laporan keuangan. Objek penelitian yang digunakan adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Suprianto (2018) juga melakukan penelitian yang menguji pengaruh variabel kapabilitas APIP terhadap opini BPK.

Penelitian tersebut dilakukan pada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat tahun 2016. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Bandi (2015) memperoleh hasil yang berbeda, penelitian tersebut menghasilkan Kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini BPK. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Peni (2017) dengan menggunakan kapabilitas APIP sebagai salah satu variabel independen yang diteliti. Penelitian tersebut juga menghasilkan bahwa kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit atas LKPD di Indonesia.

Agustiawan dan Rasmini (2016) serta Kalbuadi (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan SPIP sebagai salah satu variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Keduanya penelitian tersebut menghasilkan SPIP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Mutiara et al. (2022). Penelitian tersebut menghasilkan kelemahan sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap opini audit pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

(SPIP) terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Apakah kapabilitas APIP berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah maturitas SPIP berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kapabilitas APIP terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh maturitas SPIP terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketersediaan data, periode penelitian ini menggunakan tahun 2020 dan tahun 2021.

- 2) Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang telah memperoleh level kapabilitas APIP, level maturitas SPIP, dan opini audit atas LKPD mulai dari tahun 2020 dan tahun 2021.
- 3) Data yang digunakan adalah data kapabilitas APIP dan maturitas SPIP pemerintah daerah di Indonesia tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2020-2021 serta data opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2020-2021 diperoleh dari Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPK.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang berimplikasi pada pemberian rekomendasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan, antara lain:

- 1) Menghasilkan saran dan masukan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien dan efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur akademik sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan menguraikan mengenai latar belakang perlunya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua akan menjabarkan mengenai kerangka teori yang bersifat umum yang diambil dari studi literatur dan hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis dari variabel penelitian yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan model penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat akan menjabarkan tentang pembahasan mengenai hasil pengolahan dan analisis statistik dari data penelitian sebagai dasar penentuan penerimaan atau penolakan atas hipotesis awal yang telah ditentukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima akan memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran, serta implikasi berupa rekomendasi kebijakan kepada berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan hasil penelitian.